

PENGARUH PAD, TAX EFFORT, BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Cindi Oktavia

cindicindioktavia@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to find out the impact of the local own-source revenue, the Tax Effort and the capital expenditure toward the level of the financial autonomy of the local government to the regencies and to the cities in East Java during 2017-2019. The population of this study are the regencies and the cities in East Java. The type of this study is quantitative research, the sample are collected by applying the saturation sampling and there are 114 samples from 29 regencies and 9 cities in East Java. The data of this study is secondary data which is the realized local government budget report during 2017-2019. The analysis applies the multiple linier regression with SPSS program. The result show that the local own-source revenue give positive impact to the level of the financial autonomy of the local government, on the other hand the tax effort does not impact the level of the financial autonomy of the local government and the capital expenditure give negative impact to the level of the financial autonomy of the local government.

Keywords: the local own-source revenue, the tax effort, the capital expenditure, the financial autonomy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Tax Effort* dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian berikut adalah penelitian kuantitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan jumlah sampel 114 sampel dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur. Data penelitian ini berupa data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017-2019. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, *tax effort*, belanja modal, tingkat kemandirian keuangan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi mulai dilaksanakan sejak Januari 2001. Proses tersebut diawali pengesahan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pemberlakuan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah dengan memberikan kewenangan seluas luasnya kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pemerintahan dan

pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini memaksa pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Didalam desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan terutama pada sektor publik, dengan cara menarik investor untuk menanam modal pada daerah, dengan begitu akan menambah pendapatan daerah (Maharani, 2010 dalam Kusnandar dan Siswanto, 2012). Bukanlah hal mudah menerapkan otonomi daerah di Indonesia dikarenakan sumber daya disetiap daerah berbeda-beda, selain itu perbedaan wilayah juga menjadi aspek penting, dan adanya kesenjangan fiskal dan investasi antar daerah. Sehingga semakin luas wilayah dan semakin padat penduduknya maka akan semakin besar kebutuhan yang diperlukan dan dana yang dialokasikan dalam kegiatan operasional.

Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melakukan pengalihan komposisi belanja daerah yang diharapkan mampu meningkatkan investasi dalam bentuk bangunan, peralatan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tujuan memberi kebebasan untuk pemerintah daerah guna memaksimalkan potensi pendanaan daerahnya sendiri, setiap daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda. Daerah yang tidak memiliki kegiatan di sektor industri akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki kegiatan di sektor industri akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Untuk mengurangi adanya kesenjangan Pemerintah pusat memberikan dana transfer yang digunakan oleh daerah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya selain penerimaan dari pendapatan asli daerah. Upaya pajak (*Tax Effort*) adalah kemampuan rasio antara kapasitas masyarakat untuk membayar pajak dalam satu daerah dengan penerimaan pajak. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan aspek penting untuk mengukur bagaimana masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu aspek penting dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah. Daerah tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang kuat jika Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) Tinggi. Oleh sebab itu sangat diperlukan retribusi dan objek pajak yang stabil serta penunjang lain seperti sektor industri, Sementara dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana transfer lainnya yang diberikan oleh pemerintah hanya menjadi stimulus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan belanja modal tidak selamanya diiringi dengan peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) di suatu daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Dikarenakan pada penerapannya belanja modal hanya menyerap sedikit dan tergolong rendah, jauh dari perkiraan awal dana yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam APBD, sehingga hal ini menyebabkan ketidakmerataan penerimaan daerah, dan menyebabkan ketimpangan antar daerah. Fenomena ini akan berdampak pada pembangunan infrastruktur yang terhambat, yang seharusnya dapat mempercepat laju perekonomian, dikarenakan minimnya penyerapan belanja modal pemerintah daerah maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga rendah (Imawan dan Wahyudin, 2014). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Apakah *Tax Effort* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Untuk menguji pengaruh *Tax Effort* terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Mahmudi (2005), Dalam teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa hubungan antar individu dengan individu lain seperti hubungan antara agen dan prinsipal. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengatakan bahwa penerapan hak otonom dimana pemerintah pusat sebagai pemegang kepentingan dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan, dimana pemerintah pusat akan mentransfer sejumlah dana seperti dana alokasi khusus, dan alokasi umum dan dana transfer lainnya kepada pemerintah daerah sebagai agen. Kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya perlu ditingkatkan, yakni dengan mengelola sumber daya alam dan keuangan dengan baik dan maksimal sehingga mampu berguna untuk kemaslahatan masyarakat. Khusaini dan Yustika (2006) menyatakan jika kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal.

Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai desentralisasi fiskal berupa pelimpahan kedaulatan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, untuk mengelola sendiri daerahnya. Peraturan tersebut saat ini digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengemukakan jika pemerintah daerah seharusnya mampu menjalankan hak, kewajiban, dan wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri kepentingan pemerintahannya dan masyarakat sekitar dan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. Realitas hubungan fiskal antara masing-masing daerah ditandai dengan banyaknya campur tangan dari pemerintah pusat dalam proses pembangunan daerah. Dapat dilihat dengan rendahnya presentasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap nilai total pendapatan daerah dibandingkan dengan dana alokasi yang dikirim oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Otonomi Daerah

Menurut Kuncoro (2004) hak otonomi merupakan hak, kewajiban, dan wewenang daerah yang bertujuan guna mengurus dan mengatur daerahnya sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 otonomi daerah adalah kedaulatan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur keperluan dari masyarakat daerah tersebut dengan upaya yang dilakukan sendiri didasarkan aspirasi dari masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Salah satu dampak dari kebijakan diatas mengenai perpindahan orientasi pemerintah dari *command and control* menjadi orientasi dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan publik. Penyesuaian ini yang nantinya akan menjadi kiblat bagi penerapan pemerintah sebagai *stimulator, enterpreneur, dan coordinator* dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim dan Abdullah (2006) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang dibuat dari pemerintah daerah untuk menggambarkan perkiraan pembiayaan belanja daerah yang relatif tinggi, sehingga berhasil dimanfaatkan guna membayar kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi dan memperkirakan pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah untuk mencukupi pengeluarannya. APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan agenda keuangan yang harus dilaporkan dalam satu periode akuntansi dan harus diserahkan dan disepakati oleh DPRD dan pemerintah daerah, dan hasilnya disepakati menjadi peraturan daerah. Dalam APBD dijelaskan secara rinci tentang program apa saja yang direncanakan yang dapat diterapkan dalam keadaan sebenarnya yang digunakan masyarakat guna mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan bagaimana

membiayai program tersebut untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai Penyusunan APBD mempunyai beberapa tujuan, pertama menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang publik. Kedua, Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah kepada masyarakat dan DPR/DPRD. Ketiga membantu pemerintah dalam koordinasi antar bagian di lingkungan pemerintah dan pencapaian tujuan fiskal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto merupakan nilai yang timbul dikarenakan bertambahnya hasil dari seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh perekonomian suatu wilayah. PDRB harga dasar diperoleh dari menghitung jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh pada setiap tahunnya., sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menambahkan nilai barang dan jasa pada tahun tertentu. PDRB harga konstan digunakan untuk memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi disetiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2013). Sadono (2004) menyatakan bahwa peningkatan PAD disebabkan karena adanya kenaikan PDRB yang berasal dari retribusi dan sektor pajak yang mengalami peningkatan. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan ekonomi suatu daerah, dapat dilihat melalui kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan digunakan untuk kehidupan masyarakat. Apakah daerah tersebut mampu mencukupi kebutuhan masyarakat atau tidak, semakin tinggi nilai yang dihasilkan dalam suatu daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri, sedangkan apabila nilai PDRB menurun maka daerah tersebut tidak mampu menghasilkan nilai barang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dapat dipastikan daerah tersebut tidak dapat mandiri dalam segi perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 pendapatan yang diterima daerah dari hasil penerimaan daerah yang sah, retribusi daerah, pajak daerah dan lain-lain pendapat yang sah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan ini dipungut berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan sesuai ketentuan peraturan daerah yang ada. Abdul dan Kusufi (2014:101) menyatakan jika semua yang berasal dari daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). secara umum, PAD diperoleh melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan daerah dimana daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi kekayaan masing-masing, guna menunjang pelaksanaan kegiatan otonomi daerah agar tercipta hasil yang maksimal untuk kepentingan masyarakat, Oleh sebab itu pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 yang bertujuan melimpahkan wewenang kepada daerah untuk mengelola sendiri daerahnya sebagai wujud nyata desentralisasi. Agar tidak bergantung kepada dana transfer yang diberikan pemerintah pusat.

Tax Effort

Mulyanto (2002) menjelaskan bahwa Upaya pajak (*tax effort*) merupakan rasio perbandingan antara penerimaan pajak yang benar-benar diperoleh suatu daerah lalu dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak (*tax capacity potensial*). Upaya pajak merupakan ratio kemampuan membayar pajak dalam suatu daerah dengan penerimaan pajak. Cara untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak yang diterima daerah yakni dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila PDRB suatu wilayah tinggi maka dapat dipastikan kemampuan daerah tersebut dalam membayar pajak juga tinggi. Adi (2006) menyatakan jika upaya pajak (*tax effort*) suatu daerah dapat digunakan untuk melihat posisi fiskal daerah tersebut dengan membandingkan kapasitas fiskal dengan penerimaan pajak yang diperoleh. Perbandingan tersebut diperoleh apabila kapasitas fiskal memiliki nilai

0 sampai dengan 1. Dengan begitu dapat disimpulkan apabila *tax effort* mendekati angka 1 maka kapasitas fiskal daerah tersebut dikatakan kuat dan apabila *tax effort* mendekati angka 0 dapat dipastikan bahwa posisi fiskal daerah tersebut lemah.

Belanja Modal

Menurut Undang Undang Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal merupakan belanja daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode anggaran dan apabila dikelola dengan baik dapat menambah kekayaan dan aset daerah yang nantinya akan menambah biaya-biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan. Diharapkan aset-aset yang nantinya dimiliki pemerintah daerah mampu memberi manfaat terhadap kesejahteraan pelayanan publik. Pemerintah memiliki cara lain untuk menambah aset tetap daerah tanpa harus menunggu dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi yaitu dengan adanya investasi agar pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut mengalami peningkatan *financial*. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan pemerintah untuk menambah aset tetap yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun periode akuntansi, selain digunakan untuk kepentingan dan keperluan publik, belanja modal digunakan pemerintah daerah sebagai investasi jangka panjang yang nantinya dapat memperoleh manfaat yang lebih banyak, pemeliharaan aset tetap memerlukan biaya yang bersifat menambah dan mempertahankan masa manfaat dari aset tersebut, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi dan umum (Halim, 2004:73).

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2001) komponen utama pendapatan asli daerah merupakan gambaran rasio kemandirian tingkat antusiasme masyarakat dalam retribusi daerah dan membayar pajak. Ketergantungan daerah yang semakin kecil dapat dikatakan telah mandiri daerahnya. Tangkilisan dan Nogi (2007) berujar ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, yaitu: (1) Potensi ekonomi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah tolak ukur yang digunakan sebagai indikator potensi ekonomi daerah, (2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, diartikan kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Tabel 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

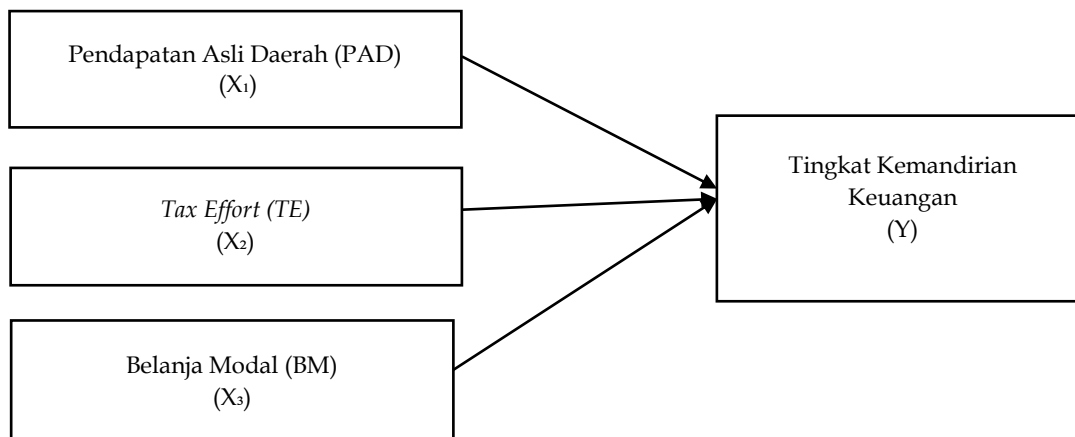
Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Menurut Halim (2007:169) yang menjadi dasar dalam kebijakan otonomi daerah adalah pelaksanaan Undang-Undang dengan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah seperti: (1) Pola hubungan instruktif, dimana peran yang lebih dominan berada pada pemerintah pusat dibandingkan dengan kemandirian keuangan pemerintah daerah (pemerintah daerah tidak mampu menjalankan finansial otonomi daerah dengan baik), (2) Pola hubungan konsultatif, dimana pemerintah pusat sudah mulai percaya bahwa pemerintah daerah sudah sedikit mampu mengelola finansial daerahnya, sehingga pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi, (3) Pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah mulai

beralih peran dari memberi konsultasi hanya menjadi partisipatif dikarenakan daerah telah dikatakan mendekati mampu mandiri dalam segi ekonomi, (4) Pola hubungan delegatif, dimana tidak ada campur tangan pemerintah pusat sama sekali dikarenakan daerah sudah mampu dan mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Yulianto (2018) menyimpulkan jika pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh daerah maka semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai kebutuhannya, Sehingga daerah tidak harus menunggu dana yang telah disediakan oleh pusat/provinsi dan daerah mampu melakukan hak otonomi daerahnya secara maksimal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh *Tax Effort* Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tax Effort adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Dengan membandingkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan realisasi hasil penerimaan (Halim, 2004: 73). Produk domestik regional bruto biasanya digunakan sebagai acuan untuk menilai seberapa besar kemampuan bayar pajak suatu daerah. Yunanto (2010) berpendapat apabila PDRB suatu daerah mengalami peningkatan, kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dikatakan baik begitu juga sebaliknya. PDRB diperoleh dari menjumlahkan nilai pendapatan bruto dari berbagai sektor perekonomian (BPS, 2012). Penelitian Wadi (2015) menunjukkan bahwa *Tax Effort* (upaya pajak) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana semakin banyak pajak yang diperoleh daerah maka akan semakin mandiri daerah tersebut sehingga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

H₂: *Tax Effort* berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal adalah belanja yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran sehingga nantinya akan menambah kekayaan dan aset daerah yang dapat berpengaruh terhadap belanja yang bersifat rutin salah satunya biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lusiana (2013) menyimpulkan bahwa dalam peneran alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Semakin besar suatu daerah dalam mengalokasikan belanja modal maka akan semakin mandiri daerah tersebut, dikarenakan semakin banyak penghasilan yang didapat dari pemanfaatan biaya modal dengan baik dan benar.

H₃: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Penelitian berikut termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, yakni merupakan metode penelitian dilandasi dengan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2008). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Pendapatan asli daerah, *tax effort* dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Populasi penelitian ini adalah kabupaten/kota yang terdapat di Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota provinsi Jawa Timur di tahun 2017-2019.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling jenuh dan sensus dalam sebuah penelitian adalah semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008). Menurut penjelasan tersebut, disimpulkan apabila sampling jenuh atau sensus merupakan teknik dengan menggunakan semua anggota populasi sebagai penentu sampel. Karena keterbatasan jumlah populasi dalam penelitian ini, sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut dengan sensus yaitu data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2017-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data dokumenter yaitu data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Tax Effort* (Upaya Pajak) dan Belanja Modal pada tahun periode 2017-2019. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, data dalam penelitian ini bersumber dari Laporan realisasi anggaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Tingkat kemandirian keuangan daerah digunakan untuk memperoleh manfaat bersama sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat melalui kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan pembangunan terhadap daerah tersebut (Muliana,

2009). Menghitung tingkat kemandirian kabupaten/kota menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Variabel independen menggunakan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan suatu sumber pendapatan yang dihasilkan dari potensi masing-masing daerah. Retribusi daerah, pajak daerah, lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber utama dari pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini dalam Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Laporan APBD Pemerintah Daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PAD = PD + RD + HPKDYD + LPADYS$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
HPKDYD	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
LPADYS	: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tax Effort

Tax Effort merupakan kemampuan membayar pajak yang didapatkan secara nyata melalui potensi kekayaan daerah yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan sumber penerimaan daerah dan total penerimaan (realisasi) setiap daerah, dengan menjumlahkan (Penerimaan bukan pajak dengan penerimaan bagi hasil pajak). Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator untuk menilai besarnya suatu PAD, Apabila PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan wajib pajak suatu daerah dalam membayar pajak juga akan mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya (Yunanto, 2010). Menurut Ardhani Septyas (2015) untuk menghitung *tax effort* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi besarnya jumlah dana anggaran yang dikeluarkan guna didistribusikan untuk keperluan pembelian/penyediaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari atau hingga satu periode akuntansi yang dipakai untuk menunjang ke pemerintahan, seperti peralatan, mesin, gedung dan bangunan, tanah, irigasi, jaringan dan belanja modal lainnya. Pengukuran variabel belanja modal menurut PP No. 71 Tahun 2010. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan \& Mesin} + \text{Belanja Gedung \& Bangunan} \\ & + \text{Belanja Jalan, Irigasi \& Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis berikut ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang pasti dan tepat dalam mengolah data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah diperoleh menjadi sebuah informasi dan kemudian disajikan dalam bentuk diagram, tabel, dan gambar (Ghozali, 2016). Dalam pengujian statistik deskriptif ini juga bertujuan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah, *Tax Effort* dan Belanja Modal dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan suatu pengujian atas data yang diperoleh untuk memenuhi asumsi dasar. Pada model regresi linier berganda terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, untuk itu perlu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi model klasik terlebih dahulu sebelum beranjak ke model regresi linier berganda. Adapun asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2016). Jika data yang dianalisis tidak normal disebabkan karena tidak terpenuhinya normalitas, kesalahan pada pengambilan sampel dapat menyebabkan terjadinya nilai ekstrem. Penelitian berikut selain menggambarkan uji grafis juga menggunakan *kolmogorov smirnov* dengan melihat signifikansinya. Residual dapat disimpulkan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi *kolmogorov smirnov* $> 0,05$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah didalam model regresi terdapat kesamaan varians variabel dari residual pengamatan/observasi yang lain (Ghozali, 2016). Apabila terjadi persamaan atau pengamatan mempunyai hasil tetap maka terjadi Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Pengujian model regresi yang adalah memiliki hasil tetap (Homokedastisitas).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi *residual* pengganggu pada periode t dengan *residual* yang terdapat pada periode $t-1$ (periode sebelumnya) di dalam model regresi linier (Ghozali, 2009:79). Apabila terjadi korelasi, dapat dikatakan adanya masalah autokorelasi. Autokorelasi terlihat apabila observasi yang saling berurutan setiap waktu dan berkaitan antara satu dengan yang lain.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2009:28) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat adanya korelasi yang tepat atau tidak antar variabel independen. Model regresi sempurna harusnya tidak mengalami korelasi diantara variabel independen. Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas terdapat pada nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila *Tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ariani dan Rina (2010) menyatakan apabila untuk mengetahui pengaruh tersebut model persamaan regresi linier berganda dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TKKD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 TE + \beta_3 BM + e$$

Keterangan:

TKKD	: Tingkat Kemandirian keuangan daerah
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_2$: Koefisien Regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
TE	: Upaya Pajak
BM	: Belanja Modal
e	: Error

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen pada laporan realisasi anggaran pada Badan pusat Statistik periode 2017-2019.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan dan menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai R^2 diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$) yang dimaksud apabila R^2 mendekati nol, maka variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Jika R^2 mendekati satu, maka variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Uji Statistik F

Uji signifikan keseluruhan dari regresi sampel atau sering disebut dengan Uji F dilakukan agar dapat mengetahui apakah variabel dependen secara bersamaan memberi pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika hasil uji F memperoleh nilai signifikan $< 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterimadengan begitu variabel independen secara bersamaan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen, apabila hasil uji f menunjukkan hasil $> 0,05$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga variabel dependen secara bersamaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

Uji t

Uji parsial atau uji *t-test* pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:84). Pengujian t dengan tingkat *level of significant* $\alpha=5\%$ sebagai berikut: Tahap pertama, jika *p-value* (kolom sig) $< \alpha = 0.05$ maka hipotesis diterima. Berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tahap kedua, jika *p-value* (kolom sig) $> \alpha = 0.05$ hipotesis ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data agar data yang terssaji menjadi mudah dipahami informatif bagi orang yang membacanya. Hasil dari analisis statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	135349	5190295	501158.18	808640.810
TaxEffort	114	14921	446354	72721.34	72741.500
BelanjaModal	114	69465	2806523	452542.60	408136.876
TKKD	114	.111	2.617	.32471	.377381
Valid N (listwise)	114				

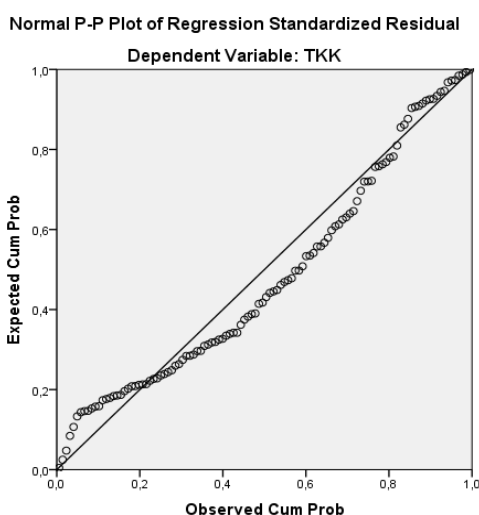
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PAD memiliki nilai minimum sebesar 135.349 dan nilai maksimum 5.190.295 dengan *mean* 501.158.18 dan standar deviasi sebesar 808.640.810. TE memiliki nilai minimum 14.921 dan nilai maksimum 446.354 dengan *mean* 72.721.34 dan standar deviasi 72.741.500. Bm memiliki nilai minimum sebesar 69.465 dan nilai maksimum 2.806.523 dengan *mean* 452.542.60 dan standar deviasi sebesar 408.136.876. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu TKKD nilai minimum sebesar 0.111 dan maksimum 2.617 dengan *mean* 0.32471 dan standar deviasi 0.377381.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normal atau tidaknya data tersebut dapat dilihat dari normal probability plot dan tabel Kolmogrov Smirnov. Hasil penelitian uji normalitas menggunakan pendekatan normal probability plot sebagai berikut:



Gambar 2

Grafik Normal P-Plot

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari Gambar 2 menunjukkan bahwa data mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa data telah berdistribusi normal dan model regresi dapat dikatakan baik. Menurut Ghozali (2016) normalitas juga dapat uji dengan menggunakan uji statistik Kolmogrov Smirnov dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06017544
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		1.052
Asymp. Sig. (2-tailed)		.218

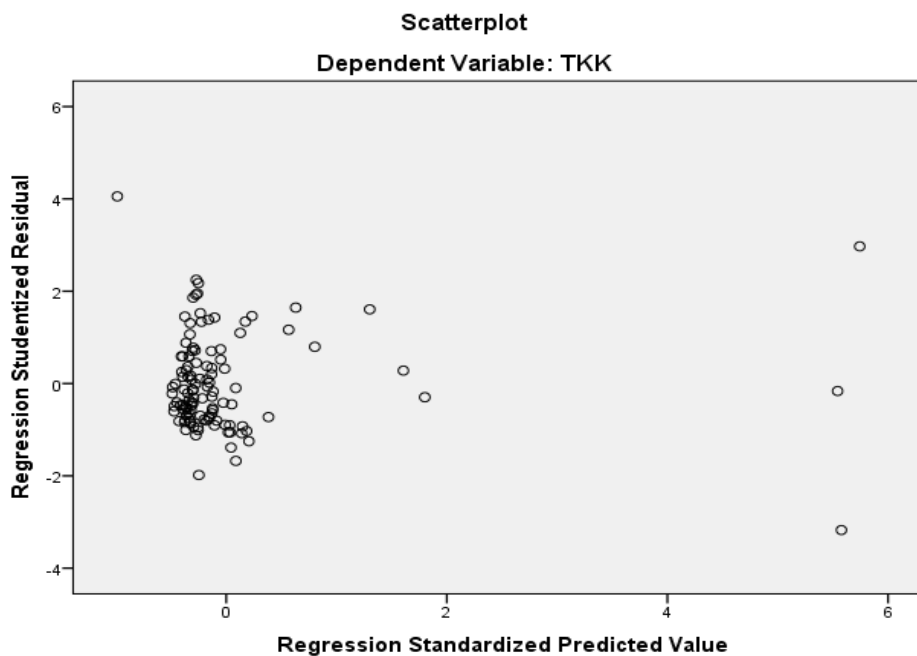
Test distribution is Normal.
Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021

Hasil probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu $0,218 > 0,05$ artinya data tersebut telah berdistribusi normal sehingga model regresi telah dikatakan baik dan uji asumsi dapat dilakukan.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yang berupa adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa *Scatter plot* tidak membentuk pola corong sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Tabel 4
Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,036	,006		5,958	,000
	PAD	-0.000000001394	,000	-,031	-,136	,892
	TE	0.000000001432	,000	,285	1,645	,103
	BM	0.000000004777	,000	,053	,219	,827

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Pernyataan tersebut diperkuat dengan perhitungan uji heterokedastisitas pada Tabel 4 menggunakan Uji Glejser, dalam perhitungan dengan Uji Glejser diketahui bahwa nilai probabilitas > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.987 ^a	.975	.974	.060990	1.250

a. Predictors: (Constant), BM, TE, PAD

b. Dependent Variable: TKKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,250 dimana terletak antara -2 < sampai < 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen pada model regresi. Hasil uji multikolinieritas yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
PAD	,160	6,251
TE	,275	3,631
BM	,139	7,196

a. Dependent Variable: TKKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa 3 variabel bebas yakni pendapatan asli daerah, *tax effort* dan belanja modal menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas tersebut tidak memiliki gejala multikolonieritas atau bebas dari multikolonieritas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam model regresi berganda variabel yang digunakan adalah satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel terikat sedangkan pendapatan asli daerah, *tax effort* dan belanja modal variabel bebas. Hasil model analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Analisis Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1					
(Constant)	.168	.010		16.270	.000
PAD	0.0000006054	.000	1.297	34.129	.000
TaxEffort	-0.0000002148	.000	-.041	-1.429	.156
BelanjaModal	-0.0000002902	.000	-.314	-7.694	.000

a. Dependent Variable: TKKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 dapat dirumuskan suatu persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TKKD = 0,168 + 0,0000006054 \text{ PAD} - 0,0000002148 \text{ TE} - 0,0000002902 \text{ BM}$$

Dari hasil regresi diatas dapat dijelaskan bahwa semua variabel bebas menunjukkan angka positif dan negatif dengan hasil PAD sebesar 0,0000006054, *tax effort* sebesar -0,0000002148, belanja modal sebesar -0,0000002902, artinya masing-masing variabel bebas memiliki hubungan positif (searah) sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap variabel terikat yakni kinerja perusahaan. Semakin tinggi nilai variabel intellectual capital, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan maka akan memberikan dampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.987 ^a	.975	.974	.060990	1.250

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 diatas menjelaskan perubahan variabel terkait dapat terikat dapat dilihat melalui nilai R Square sebesar 0,975 yang berarti 97,5% , perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah , *Tax Effort*, dan Belanja Modal. Sedangkan sisanya sebesar 2,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji apakah pendapatan asli daerah, *tax effort* dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji kelayakan model dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.684	3	5.228	1405.428	.000 ^b
	Residual	.409	110	.004		
	Total	16.093	113			

a. Dependent Variable: TKKD

b. Predictors: (Constant), BM, TE, PAD

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa Sig. < 0,05 yaitu 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD , TE , BM secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel TKKD, sehingga model regresi layak untuk digunakan sebagai model regresi.

Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.168	.010		16.270	.000
	PAD	0.0000006054	.000	1.297	34.129	.000
	TaxEffort	-0.0000002148	.000	-.041	-1.429	.156
	BelanjaModal	-0.0000002902	.000	-.314	-7.694	.000

a. Dependent Variable: TKKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Pendapatan Asli Daerah (H₁)

Dalam hipotesis yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). Hasil dari Tabel 10 menunjukkan bahwa dengan cara ini hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau < dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima yang dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Tax Effort (H₂)

Dalam hipotesis yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh *Tax Effort* (TE) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD). Hasil dari Tabel 10 menunjukkan bahwa dengan cara ini hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,156 atau > dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak yang dapat diartikan bahwa *Tax Effort* berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Belanja Modal (H₃)

Dalam hipotesis yang ketiga yaitu untuk menguji pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD). Hasil dari Tabel 10 menunjukkan bahwa dengan cara ini hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau < dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H₃ ditolak yang dapat diartikan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga semakin besar PAD yang diterima suatu daerah maka akan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk keperluan daerah seperti pembangunan, pengembangan, dan kepentingan publik lainnya. Sebisa mungkin daerah meminimalisir ketergantungannya terhadap pemerintah pusat/ provinsi. Tingkat kemandirian suatu daerah dilihat dari seberapa besar penerimaan PAD daerah tersebut, PAD digunakan untuk memperoleh sumber-sumber penerimaan yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dan mengembangkan perekonomian daerahnya. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Hermanto dan Handayani (2018) menunjukkan apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2017) yang menunjukkan apabila pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Tax Effort terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam penelitian ini *Tax effort* (Upaya pajak) Tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu penelitian 2017 sampai 2019 rasio *tax effort* daerah terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak yaitu karena adanya restitusi, ekspor dan impor yang menurun akibat melemahnya ekonomi global dan menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga penerimaan PPh dan pajak lainnya berkurang, mengakibatkan rendahnya PDRB yang ada pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Tax Effort* sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah, karena selain mendapat dana transfer dari Pemerintah Pusat, *Tax Effort* merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

tingkat kemandirian keuangannya, agar tidak menggantungkan pada dana transfer. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wadi (2015) dan Wida (2018) yang menyatakan apabila *tax effort* berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil penelitian ini Belanja Modal Berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. hal ini dikarenakan ketidakmampuan daerah dalam mengelola keuangan dan penerimaan belanja modal kurang optimal. Belanja modal seharusnya digunakan daerah untuk menambah aset-aset daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan hendaknya dialokasikan untuk sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kenyataannya belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan yang bernilai konsumtif dan spekulatif sehingga menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ikasari (2015), Darwis (2015), Tri *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Putri (2016) yang menunjukkan apabila belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Tax Effort* (TE), dan Belanja Modal (BM) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2019. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sebagai berikut: (1) Hasil dari penelitian menunjukkan apabila pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2017-2019. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah lebih besar daripada dana transfer dari pemerintah pusat sehingga daerah tersebut mampu secara mandiri untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, (2) Hasil dari penelitian menunjukkan apabila *tax effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2017-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya nilai *tax effort* pada suatu wilayah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah; (3) Hasil dari penelitian menunjukkan apabila belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2017-2019. Hal ini disebabkan penggunaan belanja modal yang seharusnya untuk kegiatan produktif akan tetapi digunakan untuk kegiatan konsumtif. Belanja modal dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan pada setiap wilayah tidak merata hal ini mengindikasikan bahwa besarnya nilai belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian diatas, saran yang sebaiknya dilakukan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa ratio tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi Jawa Timur sebesar 30% dan termasuk kedalam kategori rendah, diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah, agar memperoleh pendapatn asli daerah yang leboh besar, 2) Peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian menjadi 5 tahun atau lebih, sehingga memperoleh data yang lebih signifikan, (3) Pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggunakan objek lain, tidak hanya

mengenai tingkat kemandirian keuangan bisa juga mengenai pertumbuhan penduduk dan pengangguran yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur, (4) Pada penelitian selanjutnya dapat mencari informasi yang lebih *update* sebagai sumber informasi yang lebih relevan dan dibutuhkan dalam sebuah penelitian, (5) Pada penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota selain provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. dan M. S. Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Abdul, H. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama Salemba empat. Jakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Adi, P. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, Studi pada Kabupaten dan Kota se JawaBali. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Ardhani, S. V. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, *Tax Effort* (Upaya Pajak) dan Alokasi Belanja Modal Di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Ariani dan K. Rina. 2010. Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan *Tax Effort* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Keuangan Kabupaten Kota*. Buku 1. BPS Jawa Timur. Surabaya.
- _____. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Kabipaten/Kota di Indonesia. <https://bps.go.id>. Diakses Tanggal 12 Desember 2020 (08:30).
- _____. 2019. *Statistik Keuangan Kabupaten Kota*. Buku 1. BPS Jawa Timur. Surabaya
- Darwis, T.E. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi* 3(1).
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, A., S. Abdullah. 2006. Studi atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(2). ISSN: 0216-8642.
- Hermanto, S. B., dan Handayani, N. 2018. Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 2(2).
- Ikasari, P. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Diy Periode 2007-2014). *Artikel*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Imawan, R. dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Khusaini, M. dan Yustika, 2006, *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Malang.

- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Kurnia, R. A., G. A. Putri. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Syariah Paper Accounting*: 364-369.
- Kusnandar dan D. Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lusiana, D. I. 2013. Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Profita* 1(8).
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja sektor publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Mulyanto. 2002. Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosaren Propinsi Jawa Tengah (*The Potential of Local Government Revenue : A Case Study in Subosuka Wonosaren District, Central Java Provinces*). *Economics Faculty* Sebelas Maret University. Surakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. *Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Puspitasari A. 2017. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Accounting Global Journal* 1 (1).
- Rahman A. dan C. L. Ayunda. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008- 2012. *Jejak Journal Of Economics an Policy*. ISSN 1979-715X.
- Rina A. dan Kurnia. 2010. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan *Tax Effort* (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). *Skripsi*. FE USMS, Surakarta.
- Sadono, S. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Santoso, S. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik Dengan SPSS*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Syahputra, A. 2006. *Perpajakan*. USU Repository. Sumatra.
- Tangkilisan dan H. Nogi. 2007. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta
- Tarigan, R. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT Bumi Aksar. Jakarta
- Tri, D. Y., H. Sukarno, S. Maria. 2018. Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 12 (1): 1-44.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wadi, S. 2015. Analisis Pengaruh Upaya Pajak (*Tax Effort*), Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2007-2012. *Tesis*. Program studi Magister Ekonomi dan Bisnis. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
- Wida, R. M. 2018. Analisis Tentang Kemandirian Pembangunan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi* 5 (1). ISSN: 2356-3923.

- Yulianto, A. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016). *Publikasi Ilmiah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yunanto, L. 2010. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten. *Tesis*. Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Surakarta.